

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Akan Panggil Disdik Terkait Masalah KJMU

Komisi E DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal kabar pencabutan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Adapun total yang didapat mahasiswa lewat KJMU tersebut sebesar Rp 9 juta per semester.

"Kami dari Komisi E minggu depan akan mengadakan rapat pertemuan, rapat dengar pendapat dengan Disdik, kami dengarkan nanti duduk masalah seperti apa," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak pada Rabu (6/3/2024).

Jhonny mengaku, telah meminta klarifikasi dari Disdik soal rencana pencabutan KJMU. Kata dia, keterangan dari Disdik tidak memuaskan sehingga dia perlu memanggilnya untuk menjelaskan secara mendetail.

"Kami sudah tanyakan ke Disdik tapi jawaban mereka jawaban normatif. Nanti tanyakan ke Disdik, jawaban normatif," ujar Jhonny.

Selain itu, Jhonny juga berencana menyampaikan aspirasinya ini kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia berharap Heru mempertimbangkan kembali kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

"Saya nanti akan berusaha menyampaikan kepada beliau (Heru)," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Jhonny juga mengingatkan Disdik DKI Jakarta agar tidak langsung mencabut bantuan KJMU untuk para mahasiswa di Jakarta sebelum pembahasan lebih lanjut dengan dewan.

Jika ada kebijakan baru, kata dia,

hendaknya diterapkan dalam menjaring pendaftar KJMU yang baru.

"Kalau mau mengatur supaya orang yang dapat KJMU adalah orang yang layak, tapi jangan kita terapkan dengan orang yang sudah eksisting sekarang ini," ucapnya.

Menurut dia, perekonomian masyarakat Jakarta tidak menentu. Mungkin saja pada saat ini perekonomiannya membaik, namun tiba-tiba sang ayah sebagai tulang punggung keluarga justru mendapat pemecatan.

"Okelah enam bulan lalu dikatakan dia sudah hampir miskin, kemudian sekarang dia miskin sekali karena bapaknya meninggal atau bapaknya kena PHK. Apakah Pemprov DKI itu mengecek? itu tidak tercatat," pungkas Jhonny.

Sementara itu Jhonny mengakui adanya keluhan dan aduan yang masuk soal kebijakan pencabutan dari program KJMU tersebut. Pengawas pemerintah daerah itu menilai, pengkategorian kemiskinan yang dibuat eksekutif sering tidak sesuai dengan kenyataan.

Jhonny mengatakan, tingkat kemiskinan masyarakat terutama orangtua pelajar sangat fluktuatif. Sementara pembaruan data tidak dilakukan setiap saat oleh organisasi perangkat daerah terkait.

Jhonny mengingatkan, perekonomian masyarakat Indonesia terutama Jakarta baru saja merangkak naik pasca dihantam pagebluk Covid-19.

Secara medis, masyarakat

Jakarta cukup baik karena sudah mendapatkan

vaksinasi namun secara perekonomian mereka masih terkena imbasnya. (faf)



Istimewa